

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Proses demokrasi yang ada di Indonesia, Pemilihan Umum merupakan suatu hal yang penting karena melibatkan rakyat secara langsung menentukan wakil mereka untuk menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam Pemilu kerap melibatkan berbagai komponen Masyarakat secara langsung. Pada pelaksanaan Pemilu diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang banyak, peralatan yang kompleks untuk terjaminnya keterlaksanaan Pemilu sekaligus meminimalisasi dampak negatifnya terutama pada penerapan komponen penggunaan kertas suara yang menimbulkan limbah sekaligus menemukan tindakan untuk pengelolaannya. Pemilu yang melibatkan banyak warga sejatinya terselenggara dengan baik karena tujuannya adalah untuk membuka dan mengantar Masyarakat bangsa mewujudkan cita-citanya secara demokrasi. Mewujudkan demokrasi melalui pemilu juga membuka peluang secara lebih riil karena padanya ditemukan momentum yang strategis dan penting dalam melihat praktik-praktik mana yang akan diaplikasikan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam mengisi kemerdekaan sesuai amanat para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebagai praktik demokrasi yang nyata, kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemilu sangat relevan untuk ditelisik. Hal ini tentu penting untuk menemukan indikator sejauh mana nilai demokrasi yang selalu dikembangkan dapat diukur dari segi masalah *freedom, autonomy, equality, representative, majority rule citizenship* (Chaniago, 2016). Hal ini tentu berkaitan dalam bentuk sistem pemilu yang menjunjung tinggi nilai etika. Melalui penerapan teori yang berbasis empiric diharapkan terwujud secara nyata suasana kepolitikan yang dapat menjadi penopang dalam membangun demokrasi yang lebih bermartabat di Indonesia sesuai standart etika yang diyakini bersama. Etika sesungguhnya

menjadi pengikat dan pengontrol dalam penerapan kekuasaan agar terhindar dari adanya praktik-praktik kekuasaan yang pada gilirannya akan menimbulkan kecurangan dan melemahkan kekuasaan sehingga lepas terkontrol.

Pada umumnya Pemilihan kepala desa kerap dilaksanakan di TPS dengan sistem sama seperti pemilihan-pemilihan lainnya dengan cara mencoblos kertas pemilihan kepala desa lalu memasukannya pada kotak yang sudah disediakan lalu di akhir dilakukannya perhitungan suara (Wijaya & Adriansyah, 2020). Biasanya pemilihan kepala desa dilakukan secara bersamaan dalam satu kabupaten dan pemerintah daerah akan menyiapkan akan fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan APBD dan diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Hambatan kerap kali ditemui selama proses persiapan dan pelaksanaan pemilihan, mulai ada tidak lengkapnya sarana dan prasarana yang di distribusikan ke desa-desa, banyak sekali suara yang tidak sah disebabkan tidak sesuai aturan dalam mencoblos kertas dan masih adanya kecurangan yang sering sekali terjadi dalam menggunakan sisa kertas suara bahkan ketika rekapitulasi suara akhir, mekanisme pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh warga desa tersebut (Adnan, 2023). Hambatan-hambatan tersebut yang kemudian membuat e-voting ini muncul.

Dalam E-voting memiliki arti yaitu menggunakan hak pilih ketika berlangsungnya pemilihan umum dengan menggunakan alat elektronik (Norbert Kersting, 2004). Sudah banyak negara yang melaksanakan Pemilihan elektronik ini di beberapa negara demokrasi besar di dunia, dan pemilihan melalui Internet digunakan di beberapa negara terutama di negara kecil dan yang secara historis bebas atas konflik. Banyak negara yang kini memperkenalkan sistem e-voting dengan tujuan meningkatkan beragam aspek terhadap proses pemilu, e-voting yang sudah dilaksanakan dan di uji coba di beberapa negara seperti Swiss, India dan Estonia namun dalam pelaksanaannya banyak pandangan-pandangan tiap negara yang belum sepenuhnya melaksanakan pemilihan umum dengan sistem e-voting ini (Mukaromah, 2019).

Mekanisme e-voting hadir seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sistematika e-voting cukup berbeda dengan sistematika pemilihan

biasa yang masih menggunakan kertas, pemilihan dengan e-voting ini cukup meminimalisir di waktu hanya dengan menggunakan teknologi dan juga dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin akan terjadi namun e-voting ini sendiri juga memiliki resiko kebocoran data yang dapat terjadi dan juga bagaimana kepastian data itu akan rahasia. Mekanisme e-voting tidak hanya dinilai sebagai bentuk modernisasi proses pemilu melainkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sistem e-voting dalam praktiknya lebih mengedepankan proses transparansi yang hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemilu yang lebih berasaskan luberjurdil.

Ada banyak sekali pilihan teknologi yang digunakan pada implementasi dari e-voting, seperti pada penggunaan smart card yang berguna untuk autentikasi pemilih, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara, penggunaan touch screen sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang digunakan. Disamping itu, e-voting juga dapat dilihat sebagai bentuk partisipasi politik langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Ditambah lagi, penggunaan cara voting konvensional sering kali ditenggarai memiliki beberapa kelemahan. Pertama, cara voting konvensional menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Kedua, metode voting konvensional menghabiskan banyak waktu sehingga pemilu baru dapat diketahui setelah berhari-hari lamanya. Ketiga, cara voting yang tidak menggunakan teknologi berpotensi untuk di curangi oleh pihak-pihak tertentu. Perbandingan sistem e-voting dengan konvensional dapat dicermati dalam hal e-voting lebih efisien, keakuratan, konkret, serta transparansi dari sistem konvensional.

Pelaksanaan sistem e-voting di Indonesia sudah beberapa kali dilakukan, salah satunya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meski hanya dalam skup pemilihan kepala desa seperti tepatnya di kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebanyak 33 kalurahan di kabupaten sleman melakukan pemilihan kepala desa secara serentak dan bupati Sleman mengatakan bahwa pemilihan kepala desa tersebut menggunakan metode e-voting berjalan dengan lancar dan tidak memakan

waktu yang cukup banyak serta tidak adanya kecurangan ketika berlangsungnya pemilihan (Pranyoto, 2020). Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Sleman pada (M. C. Sleman, 2019) mengatakan bahwa adanya sistem e-voting ini agar mendukung Sleman menjadi kabupaten smart regency ditahun 2021 seperti yang telah disampaikan oleh bupati Sleman dan juga menjawab kelemahan dari sistem perhitungan suara secara manual serta memberikan pembelajaran baru kepada Masyarakat.

Mekanisme dalam e-voting ini semata mata tidak dinilai karena modernisasi dalam proses pemilihan umum saja melainkan juga meningkatkan antusias Masyarakat dalam hal perkembangan teknologi dan informasi. Dengan adanya metode e-voting ini justru menunjukkan proses transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat dalam hal pemilu, mekanisme yang dilakukan hanya dengan menekan layer computer yang sudah disediakan panitia pemilihan dan tanpa menggunakan kertas pencoblosan lagi.

Namun disamping hal tersebut kontra akan adanya e-voting juga kerap kali terjadi dimana adanya penolakan dari beberapa pihak akan adanya pelaksanaan dengan sistem e-voting ini dan hal inilah yang menjadi pr besar pemerintah setempat terkait dalam mensosialisasikan mengenai tujuan dan sasaran dari adanya e-voting ini, penolakan tersebut terjadi dari segi teknologi dan juga umum. Ada beberapa point yang menyebabkan terjadinya kontra akan adanya e-voting ini oleh Masyarakat.

Pada Masyarakat kalangan elit menolak e-voting ini disebabkan karna ragu akan keberhasilan e-voting ini,merusak nilai dan budaya,biaya persiapan yang tinggi diawal,tingkat kepercayaan yang rendah. Sedangkan penolakan yang terjadi pada Tokoh Masyarakat Sebagian besar menolak adanya e-voting sebab mengkhawatirkan tidak akan memegang kemenangan lagi dalam kontestasi jika dengan e-voting,dimana Sebagian besar tokoh masyarakat incumbent sudah menjadi rahasia umum mereka memiliki sumber daya yang dapat memenangkan mereka Kembali dalam pemilihan kepala desa ini namun dengan adanya e-voting

ini justru menutup fasilitas mereka untuk mendapatkan kemenangan dan kontestasi dilakukan sesuai dengan potensi masing-masing kandidat (Hidayat, 2020).

Dari banyaknya Pro dan kontra dalam sistem pemilihan e-voting ini adalah sebuah hal yang menjadi sorotan dalam pemilihan kepala desa yang berlangsung di Kabupaten Sleman tepatnya di Kalurahan Kepuharjo dan Kalurahan Sidoluhur yang menarik peneliti untuk menjadi pilihan perwakilan dari desa berdasarkan karakteristik desa tertinggal dan jarak jauh dari kota kabupaten dan provinsi serta desa maju yang jaraknya lebih dekat dari kota kabupaten dan provinsi untuk peneliti kulik dan juga bahas perbandingan persepsi antar masyarakatnya.

Berdasarkan data tingkat Pendidikan dua kalurahan Kepuharjo dan Sidoluhur terdapat beberapa perbedaan:

Tabel 1. 1 Data Pendidikan Kalurahan Kepuharjo

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	N	%	n	%
1	Tidak / Belum Sekolah	3223	83.15%	1555	40.12%	1668	43.03%

Sumber: kepuharjosid.slemankab.go.id

Tabel 1. 2. Data Pendidikan Kalurahan Sidoluhur

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	N	%	n	%
1	Tidak / Belum Sekolah	1787	16,99%	849	8,07%	938	8,92%

Sumber: sidoluhur.desa.id

Dari data tingkat Pendidikan kedua kalurahan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya tingkat Pendidikan pada kalurahan Sidoluhur memiliki presentasi yang lumayan tinggi, hal ini nantinya akan menjadi salah satu faktor penulis untuk melakukan penelitian dalam mencari bagaimana perbedaan persepsi Masyarakat dua kalurahan tersebut. Seberapa paham dan aktifnya Masyarakat dalam mengikuti pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting ini.

Dalam proses pemindahan sistem pemilihan yang bermula kertas menjadi sistem e-voting tentunya memiliki banyak hambatan dalam proses menyampaikan kepada Masyarakat, dalam hal ini peneliti mencoba memaparkan bagaimana persepsi Masyarakat Kalurahan Kepuharjo dengan Kalurahan Sidoluhur Kabupaten Sleman dalam pemilihan e-voting.

Tabel 1. 3. Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian Kalurahan Kepuharjo

No	Kelompok	Jumlah		Laki-Laki		Perempuan	
		n	%	n	%	N	%
1	Petani/Perkebunan	1150	29.69%	557	14.38%	593	15.31%
2	Belum/Tidak Bekerja	666	17.20%	357	9.22%	309	7.98%
3	Pelajar/Mahasiswa	603	15.57%	304	7.85%	299	7.72%
4	Karyawan Swasta	462	11.93%	254	6.56%	208	5.37%
5	Mengurus Rumah Tangga	408	10.53%	5	0.13%	403	10.41%
6	Wiraswasta	266	6.87%	182	4.70%	84	2.17%
7	Buruh Harian Lepas	125	3.23%	114	2.94%	11	0.28%
8	Sopir	33	0.85%	33	0.85%	0	0.00%
9	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	29	0.75%	19	0.49%	10	0.26%
10	Pensiunan	25	0.65%	16	0.41%	9	0.23%
11	Guru	20	0.52%	4	0.10%	16	0.41%
12	Perangkat Desa	18	0.46%	18	0.46%	0	0.00%
13	Pedagang	14	0.36%	1	0.03%	13	0.34%
14	Peternak	12	0.31%	7	0.18%	5	0.13%
15	Buruh Tani/Perkebunan	7	0.18%	5	0.13%	2	0.05%
16	Pembantu Rumah Tangga	4	0.10%	0	0.00%	4	0.10%
17	Karyawan Bumn	4	0.10%	4	0.10%	0	0.00%
18	Lainnya	4	0.10%	3	0.08%	1	0.03%
19	Karyawan Honorer	4	0.10%	1	0.03%	3	0.08%
20	Perdagangan	4	0.10%	0	0.00%	4	0.10%
21	Kepolisian Ri (Polri)	3	0.08%	2	0.05%	1	0.03%
22	Tentara Nasional Indonesia (Tni)	3	0.08%	3	0.08%	0	0.00%
23	Perawat	2	0.05%	0	0.00%	2	0.05%
24	Dosen	2	0.05%	0	0.00%	2	0.05%
25	Seniman	2	0.05%	2	0.05%	0	0.00%

26	Tukang Batu	1	0.03%	1	0.03%	0	0.00%
27	Mekanik	1	0.03%	1	0.03%	0	0.00%
28	Kepala Desa	1	0.03%	1	0.03%	0	0.00%
29	Anggota Dprd Kabupaten/Kota	1	0.03%	1	0.03%	0	0.00%
30	Pelaut	1	0.03%	1	0.03%	0	0.00%
31	Arsitek	1	0.03%	0	0.00%	1	0.03%
32	Transportasi	1	0.03%	0	0.00%	1	0.03%
	TOTAL	3873	100%	1838	47.46%	1881	48.57%

Sumber: kepuharjosid.slemankab.go.id

Tabel 1. 4 Masyarakat Berdasarkan Mata Pencapaian Kalurahan Sidoluhur

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		N	%	n	%	N	%
1	Belum/Tidak Bekerja	2225	16.99%	1097	8.38%	1128	8.61%
2	Pelajar/Mahasiswa	2041	15.59%	1047	8.00%	994	7.59%
3	Mengurus Rumah Tangga	1882	14.37%	10	0.08%	1872	14.30%
4	Buruh Harian Lepas	1606	12.27%	1161	8.87%	445	3.40%
5	Karyawan Swasta	1440	11.00%	893	6.82%	547	4.18%
6	Wiraswasta	940	7.18%	620	4.73%	320	2.44%
7	Pensiunan	421	3.22%	316	2.41%	105	0.80%
8	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	417	3.18%	236	1.80%	181	1.38%
9	Petani/Perkebunan	258	1.97%	187	1.43%	71	0.54%
10	Buruh Tani/Perkebunan	236	1.80%	159	1.21%	77	0.59%
11	Pedagang	182	1.39%	61	0.47%	121	0.92%
12	Perdagangan	142	1.08%	62	0.47%	80	0.61%
13	Lainnya	141	1.08%	92	0.70%	49	0.37%
14	Guru	121	0.92%	39	0.30%	82	0.63%
15	Kepolisian Ri (Polri)	59	0.45%	57	0.44%	2	0.02%
16	Industri	56	0.43%	41	0.31%	15	0.11%
17	Karyawan Bumh	52	0.40%	39	0.30%	13	0.10%
18	Sopir	47	0.36%	47	0.36%	0	0.00%
19	Karyawan Honorer	44	0.34%	25	0.19%	19	0.15%
20	Tentara Nasional Indonesia (Tni)	26	0.20%	26	0.20%	0	0.00%
21	Perangkat Desa	22	0.17%	22	0.17%	0	0.00%
22	Dosen	20	0.15%	12	0.09%	8	0.06%

23	Tukang Jahit	16	0.12%	3	0.02%	13	0.10%
24	Dokter	15	0.11%	6	0.05%	9	0.07%
25	Tukang Batu	14	0.11%	14	0.11%	0	0.00%
26	Mekanik	12	0.09%	12	0.09%	0	0.00%
27	Pembantu Rumah Tangga	12	0.09%	1	0.01%	11	0.08%
28	Perawat	11	0.08%	0	0.00%	11	0.08%
29	Konstruksi	9	0.07%	9	0.07%	0	0.00%
30	Transportasi	8	0.06%	7	0.05%	1	0.01%
31	Tukang Las/Pandai Besi	7	0.05%	7	0.05%	0	0.00%
32	Bidan	7	0.05%	0	0.00%	7	0.05%
33	Tukang Kayu	7	0.05%	7	0.05%	0	0.00%
34	Pelaut	6	0.05%	6	0.05%	0	0.00%
35	Tukang Listrik	5	0.04%	5	0.04%	0	0.00%
36	Wartawan	5	0.04%	4	0.03%	1	0.01%
37	Apoteker	5	0.04%	1	0.01%	4	0.03%
38	Peternak	5	0.04%	5	0.04%	0	0.00%
39	Penata Rias	4	0.03%	0	0.00%	4	0.03%
40	Tukang Cukur	4	0.03%	4	0.03%	0	0.00%
41	Karyawan Bumd	4	0.03%	1	0.01%	3	0.02%
42	Seniman	4	0.03%	4	0.03%	0	0.00%
43	Notaris	4	0.03%	2	0.02%	2	0.02%
44	Ustadz/Mubaligh	3	0.02%	3	0.02%	0	0.00%
45	Pengacara	2	0.02%	2	0.02%	0	0.00%
46	Penata Rambut	2	0.02%	1	0.01%	1	0.01%
47	Konsultan	2	0.02%	2	0.02%	0	0.00%
48	Buruh Peternakan	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
49	Paraji	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%
50	Kepala Desa	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
51	Anggota Bpk	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
52	Pilot	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
53	Arsitek	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
54	Penterjemah	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%
55	Juru Masak	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%
56	Penata Busana	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%
57	Perancang Busana	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%
	TOTAL	13094	100%	6358	48.56%	6199	47.34%

Sumber: sidoluhur.desa.id

Dapat dilihat bahwasannya kondisi pekerjaan 2 kalurahan tersebut memiliki kondisi yang berbeda dimana pada tabel dijelaskan bahwasannya kalurahan kepuharjo mayoritas masyarakatnya adalah petani dan kalurahan sidoluhur mayoritas masyarakatnya adalah karyawan/Pegawai ataupun buruh.

Tabel 1. 5 Persamaan dan Perbedaan kalurahan

No	Persamaan	Perbedaan	
		Kepuharjo	Sidoluhur
1	Satu kabupaten yang sama	Tingkat Pendidikan yang tidak terlalu tinggi	Tingkat Pendidikan yang cukup baik
2	Sama-sama menggunakan e-voting pada pemilihan kepala desa	Paling banyak mata pencaharian Masyarakat sebagai petani/Perkebunan dan buruh harian	Paling banyak mata pencaharian Masyarakat sebagai pekerja kantor
3.		Jarak tempuh menuju pusat kota provinsi sejauh 24 Km	Jarak tempuh menuju pusat kota provinsi sejauh 11 Km
4.		Jumlah keseluruhan penduduk 3.722	Jumlah keseluruhan penduduk 10.520

Sumber: Penulis (2023)

Meskipun Kalurahan Kepuharjo dan Kalurahan Sidoluhur kabupaten Sleman berada di kabupaten yang sama dengan sistem pemilihan yang sama namun tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan persepsi yang berbeda dari Masyarakat akan adanya pemilihan e-voting di lingkungannya, apakah e-voting ini membantu atau justru membuat warga bingung. sebab letak kedua daerah yang berbeda dan memiliki kebiasaan yang tak sama juga menjadi salah satu faktor penulis untuk melakukan perbandingan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan e-voting ini. Dengan kebiasaan dan geografis yang berbeda ini apakah akan mempengaruhi dalam hal pemilihan dengan sistem teknologi.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) bidang pembinaan pemerintahan desa merupakan pelaksana dari Program evoting untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sosialisasi Program e-voting merupakan

tantangan tersendiri bagi (BPMPD) bidang pembinaan pemerintahan desa agar terwujudnya masyarakat yang melek teknologi oleh karena itu pihak BPMPD menggunakan beberapa media dalam mensosialisasi diantaranya, media cetak berupa koran, banner, dan pamflet serta media 7 elektronik berupa, berita online dan lainnya (BISTIAN, 2015). Dengan e-voting ini masyarakat desa juga secara langsung dapat memperoleh wawasan dalam bidang teknologi yang bertujuan menjadikan masyarakat desa jauh dari keterbelakangan teknologi.

B. Rumusan Masalah

Di lihat dari latar belakang permasalahan diatas dapat diambil kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi Masyarakat Kalurahan Kepuharjo dan Kalurahan Sidoluhur Kabupaten Sleman melakukan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem e-voting?
2. Bagaimana perbandingan partisipasi masyarakat Kalurahan Kepuharjo dengan Kalurahan Sidoluhur Kabupaten Sleman dalam menggunakan sistem e-voting pada pemilihan kepala desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi Masyarakat Kalurahan Kepuharjo dan Kalurahan Sidoluhur Kabupaten Sleman dalam pemilihan kepala desa menggunakan sistem e-voting.
2. Untuk mengetahui perbandingan partisipasi Kalurahan Kepuharjo dengan Kalurahan Sidoluhur Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan e-voting pada pemilihan kepala desa.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini penulis harapan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman khusus dalam persepsi masyarakat dalam menjalankan pemilihan dengan sistem E-voting

2. Diharapkan dapat memberikan pandangan yang maju kepada Masyarakat terkait perkembangan zaman yang pesat terkhusus dalam segi teknologi

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya terkait persepsi masyarakat dalam pemilihan dengan sistem e-voting di tiap-tiap daerah nantinya.
2. Dapat menjadi tolak ukur akan perbandingan minat Masyarakat akan sistem e-voting di tiap-tiap kalurahan
3. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menyamaratakan tiap-tiap kalurahan terkhusus pada kabupaten Sleman.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini menggunakan 10 literatur review artikel jurnal yang berbeda-beda namun masih memiliki korelasi yang sama mengenai sistem pemilihan dengan e-voting. Adanya kajian Pustaka ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan atau pembaharuan atas penelitian-penelitian sebelumnya. Literatur penelitian ini dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu: pertama, Implementasi pemilihan kepala desa dengan e-voting, kedua, partisipasi Masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah, ketiga, perbandingan e-voting dengan pemilihan konvensional.

Literatur yang mengkaji mengenai Implementasi pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem e-voting ditemukan 5 artikel yang membahas akan hal tersebut yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2022), (Basyari et al., 2023),(Juaningsih et al., 2020),(Kholid, 2019),(Hidayatulloh, 2021). Implementasi dari adanya pemilihan dengan e-voting ini banyak menimbulkan pro dan juga kontra, implementasi akan kebijakan pemilihan kepala desa dengan e-voting secara serentak demi mewujudkan pemilu yang partisipatif, transparan dan akuntabel belum dapat dikatakan maksimal sebab masih banyak yang dibutuhkan seperti sumber daya yang

berkualitas, fasilitas yang memadai dan perlu adanya pengawasan yang efektif (Kholid, 2019).

Klasifikasi dari literatur kedua mengkaji partisipasi Masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah ada dua yang penulis temukan dalam artikel jurnal yang diteliti oleh (Ahmad Averus & Alfina, 2020), (YASA, 2018). Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh beberapa aspek penting yaitu kesadaran politik masyarakat dan keyakinan politik masyarakat. Jika Masyarakat sadar akan pentingnya berpolitik maka Masyarakat akan secara sadar melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Apabila partisipasi Masyarakat menurun akan pemilihan berarti ada yang salah terhadap pemahaman Masyarakat akan pentingnya pemilihan umum (Ahmad Averus & Alfina, 2020). Kurangnya pemahaman politik serta proses penyampaian informasi mengenai politik merupakan salah satu faktor penghambat bagi masyarakat pemilih pemula, serta belum tersebar rata pendidikan politik untuk masyarakat terkhusus di daerah-daerah yang sedikit sulit dijangkau (YASA, 2018).

Klasifikasi dari literatur ketiga mengenai perbandingan e-voting dengan pemilihan konvensional Dimana pada literatur yang penulis dapatkan ada 3 penelitian yang merujuk pada perbandingan tersebut penelitian-penelitian ini dilakukan oleh (Santoso et al., 2023), (Wulansuci et al., 2018), (Gultom, 2020). e-voting yang berfungsi sebagai media pengganti kertas surat suara dalam pemilihan umum. e-voting berbeda dengan pemilihan konvensional dimana sistem pemilihan konvensional menggunakan kertas dan dengan sistem perhitungan manual, sedangkan e-voting menggunakan teknologi tanpa adanya kertas, hal ini memiliki kelebihan seperti mengurangi kekeliruan dan kecurangan pemilih dalam memberikan, dan juga bisa dengan cepat dapat. Kelebihan inilah yang akan menjadi point dalam mempertimbangkan pemilu (Wulansuci et al., 2018).

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	(Prasetyo, 2022)	Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E Voting Di Kabupaten Sleman Tahun 2020 (Studi Di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati)	Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa adanya pelaksanaan pemilu menggunakan e-voting di desa Sinduadi ini masih memiliki permasalahan seperti masi adanya alat yang eror, belum updatenya data pemilih tetap yang masih menggunakan data 2019 dan peserta pemilih yang sakit tidak dapat memilih dikarenakan peserta pemilihan harus hadir di lokasi pemilihan.
2.	(Basyari et al., 2023)	Implikasi Penerapan Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui Konsep Agile Government Di Kabupaten Sleman	Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya banyak lansia yang merasa dipermudah karena adanya sistem e-voting ini dan meminimalisir terjadinya golput. Tetapi dalam proses pelaksanaannya sistem e-voting mudah untuk di hack oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
3.	(Juaningsih Et Al., 2020)	Penerapan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0	Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwasannya konsep e-voting untuk pelayanan publik pada penyelenggaraan pemilu belum dapat dikatakan baik, yang mengakibatkan kepuasan Masyarakat akan pemilu menurun
4.	(Santoso Et Al., 2023)	Pemilihan Kepala Desa Secara Digital Di Kabupaten Sleman	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pilkades yang terjadi di Kabupaten Sleman pada 2020 & 2021 terlaksana dengan baik, begitu pun permasalahan yang terjadi pada 2020 mulai dari teknis dan SDM pun relatif baik di tahun berikutnya. Yang hanya menjadi sedikit permasalahan hanya saja pada pandemic covid-19 yang melanda Indonesia

5.	(Wulansuci Et Al., 2018)	Perancangan Alat E-Voting Untuk Pemilihan Umum	Penelitian ini merancang alat e-voting yang berfungsi sebagai media pengganti kertas surat suara dalam pemilihan umum. e-voting ini memiliki kelebihan seperti mengurangi kekeliruan dan kecurangan pemilih dalam memberikan, dan juga bisa dengan cepat dapat. Kelebihan inilah yang akan menjadi point dalam mempertimbangkan pemilu yang akan datang
6.	(Kholid, 2019)	The Implementation Of Simultaneous Village Head Implementation Policy In Realizing Participatory, Transparent, And Accountable Election Process In Indonesia	Menghasilkan Implementasi kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak dalam mewujudkan proses pemilu yang partisipatif, transparan dan akuntabel di Bogor belum maksimal karena masih banyak ditemukan permasalahan. Dibutuhkannya sumber daya manusia yang berkualitas, fasilitasi yang memadai, pendanaan dan pengawasan yang efektif.
7.	(Gultom, 2020)	Perbandingan Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem E-Voting Dengan Konvensional Di Indonesia	Pengaturan hukum terhadap Pemilihan Kepala Desa melalui e-voting harus diperhatikan terlebih dahulu Perbandingan sistem E-voting dengan Konvensional dapat dicermati dalam hal E-voting lebih efisien, keakuratan, konkret, serta transparansi dari sistem konvensional, Penelitian ini berhasil menerapkan sistem e-voting Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari pendaftaran, verifikasi data pemilih, verifikasi data dengan smart card, presensi, proses yang e-voting serta dashboard hasil e voting.
8.	(Ahmad Averus & Alfina, 2020)	Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa	hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Pengasih

			dipengaruhi oleh dua aspek penting yaitu kesadaran politik masyarakat dan keyakinan politik masyarakat. Masyarakat Desa Pengasih yang berada di wilayah perdesaan memiliki kesadaran politik yang rendah dibanding masyarakat Desa Pengasih yang masuk wilayah perkotaan.
9.	(YASA, 2018)	Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula Di Kel.Batang Kaluku Kec.Somba Opu Kab.Gowa)	Kurangnya pemahaman politik serta proses penyampaian informasi mengenai politik merupakan salah satu factor penghambat bagi masyarakat pemilih pemula. Serta minimnya Pendidikan politik yang di berikan pemerintah yang bersangkutan terhadap pemilih pemula agar dapat melibatkan pemilih pemula secara efektif yang akan memperkuat dan mempermudah partai politik dan penyelenggara pemilu pada langkah tindak selanjutnya.
10.	(Hidayatulloh, 2021)	Problematika Pemilihan Kepala Desa Dengan Sistem E-Voting	Pada penelitian ini menunjukkan beberapa hasil : ada 3 pandangan yang dilihat disini mulai dari calon kepala desa, Masyarakat dan panitia yang memiliki pandangan berbeda-beda mengenai penundaan pemilu, persoalan e-voting yang baru dilakukan dan cukup antusias serta e-voting ini termasuk dari visi dan misi Kabupaten Sleman.

Sumber : Data Oleh Penulis (2023)

Melengkapi terkait penelitian terdahulu yang mayoritas hanya berfokus pada implementasi dari e-voting dan belum adanya penelitian yang membahas mengenai perbandingan dari persepsi masyarakat dalam hal pelaksanaan e-voting di dua kalurahan yang berbeda. Hal ini yang menjadi persoalan yang akan penulis kaji lebih dalam pada penelitian ini, sebab perbandingan dari dua kalurahan yang berada

pada kabupaten yang sama namun terletak pada daerah yang cukup berjauhan ini akan menjadi penelitian baru yang akan di kaji lebih lanjut lagi apakah perbandingan persepsi masyarakat dari dua kalurahan itu signifikan.

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan agar beberapa hal yang belum didapatkan pada penelitian sebelumnya seperti bagaimana perbandingan antar dua kalurahan dengan kabupaten yang sama tapi letak kalurahan yang berbeda apakah mempengaruhi berjalannya e-voting ini atau tidak dan bagaimana persepsi masyarakat akan adanya e-voting dalam pemilihan kepala desa.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dasar penelitian bertujuan agar penelitian terorganisir, dengan konsep-konsep yang relevan dan memiliki keterkaitan antar variable yang akan dijadikan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, penulis membuat tiga jenis teori yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Mulai dari teori mengenai persepsi, perbandingan, dan e-voting.

1. Persepsi

Persepsi memiliki pengertian yang cukup luas, banyak ahli yang memberikan arti dari persepsi itu sendiri, persepsi adalah Kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus disebut dengan persepsi. Persepsi merupakan proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indra manusia (Sugihartono, 2007). Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif dan ada juga persepsi negatif yang akan mempengaruhi Tindakan buruk manusia yang tampak atau nyata.

Persepsi juga merupakan sebuah proses penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organism atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang

dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Persepsi dan juga penginderaan adalah dua hal yang berbeda menurut (Luthans, 2006) dimana :

1. Bagian pembelian membeli peralatan yang diperkirakan menurutnya adalah peralatan yang terbaik, tetapi para insinyur menyatakan bahwa itu bukanlah peralatan yang terbaik.
2. Seseorang bawahan menjawab suatu pertanyaan berdasarkan atas apa yang ia dengar dari atasannya, bukannya apa yang senyatanya dikatakan atasannya.
3. Pekerja yang sama mungkin dilihat oleh satu pengawas sebagai pekerja yang terbaik, dan oleh pengawas yang lain dikatakan yang terjelek.
4. Penjualan wig dinilai penjual mempunyai nilai kualitas yang tinggi, namun pembeli mengatakan kualitasnya rendah.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, atau ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi disekitarnya.

a. Syarat terjadinya persepsi

Menurut (Drs.Sunaryo, 2004), syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- Adanya objek yang dipersepsi.
- Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.
- Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

b. Proses persepsi

Proses terbentuknya persepsi di dasari pada beberapa tahapan, yaitu:

- Stimulus atau Stimulus : Terjadinya persepsi di awali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.
- Registrasi : Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.
- Interpretasi : Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang

Dalam Robins pada (Simbolon, 2007) ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk menafsirkan Indera menjadi sebuah persepsi yaitu :

- Faktor dari karakteristik pribadi seperti sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan (ekspektasi).
- Faktor situasi seperti waktu, tempat kerja, keadaan sosial
- Faktor dalam target seperti seperti hal yang baru, gerakan, bunyi, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan dan kesamaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 faktor Robins diatas sebagai alat untuk untuk menganalisis persepsi Masyarakat dalam keberlangsungan e-voting pada pemilihan kepala desa.

2. Teori E-Voting

Elektronik voting atau biasa sering disebut dengan E-Voting adalah sebuah sistem pemilihan dengan hitungan yang cepat menggunakan teknologi dimana cara kerja sistem pemilihan ini tidak lagi menggunakan kertas pemilihan suara melainkan langsung menggunakan sistem elektronik, setelah suara terkumpul dan tersimpan suara akan langsung otomatis terekam dan langsung di transfer ke sistem perhitungan suara. Pada (Anistiawati, 2014) e-voting adalah sebuah jalan pemilihan umum dengan meyakinkan pemilih untuk memberikan pilihannya yang bersifat rahasia kedalam sistem elektronik. E-voting ini juga memiliki makna penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting atau pemungutan suara. E-voting bermakna sebuah penerapan dengan computer atau peralatan pendukung e-voting lainnya yang bertujuan untuk memberikan suara pada pemilihan umum, e-voting juga menerapkan demokrasi elektronik yang cukup aman, e-voting adalah sebuah aplikasi yang disiplin dan perlu dipelajari oleh para ahli di berbagai bidang. akhir-akhir ini evoting telah banyak digunakan untuk pemilihan non pemerintahan (Cetinkaya & Cetinkaya, 2007).

Point yang dapat diambil dari e-voting itu sendiri terkait teknologi hadir untuk mempermudah Langkah manusia dalam melaksanakan segala hal. Maknanya bahwa e-voting adalah sebuah cara baru untuk menggunakan hak memilih dengan menggunakan inovasi pada sistem

pemilu antara perkembangan teknologi dan juga prinsip dasar demokrasi. Pembaharuan yang terjadi dalam hal ini dimana pemilihan sebelumnya menggunakan surat suara (kertas) dengan mencoblos ataupun mencontreng berubah menggunakan teknologi dan medianya adalah komputer, pemilih hanya dengan meng-klik gambar calon yang akan dipilih. Tujuan utama dari hadirnya inovasi e-voting ialah untuk mempermudah dan mempercepat proses rekapitulasi suara dan ketepatan hasil pemilu (Lubis et al., 2022).

Memberikan perhatian khusus pada tiga aspek pemungutan suara online: konsekuensi pemungutan suara jika dilaksanakan secara online pada legitimasi prosedur demokrasi memiliki beberapa aspek : Pemungutan suara melalui internet, prinsip pemungutan suara rahasia yang wajib dan terakhir dampak dari keputusan politik yang diambil secara spontan di balik layar adalah sebuah kemungkinan (Norbert Kersting, 2004). Tiga aspek ini menimbulkan keraguan serius:

- Dengan argumen bahwa segala bentuk pemungutan suara melalui Internet berpotensi melemahkan legitimasi negara demokrasi modern dalam situasi di mana hasil pemilu hampir sama. Oleh karena itu, terdapat alasan mengapa pemungutan suara melalui internet akan menyebabkan kerentanan serius terhadap krisis legitimasi di negara-negara demokrasi modern.
- Dengan argumen bahwa e-voting di ranah publik tidak sesuai dengan kewajiban pemungutan suara secara rahasia. Oleh karena itu, pemungutan suara melalui internet harus dianggap inkonstitusional di sebagian besar negara Eropa.
- Dengan menjadikan argumen liberal utama yang mendukung demokrasi sebagai titik awal spekulasi partisan mengenai hilangnya rasionalitas demokrasi dalam demokrasi Internet di masa depan.

a. Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance*)

Adalah sebuah teori mengenai sistem teknologi informasi yang cukup berpengaruh biasanya digunakan untuk mempengaruhi penerima dan penggunaan teknologi, teori Penerimaan teknologi ini menjelaskan bagaimana penerimaan individu terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Guna dari teori ini bertujuan untuk dapat memahami mengapa pemerintah dapat menolak ataupun menerima e-voting. Dalam penerimaan teknologi ini terdapat 5 faktor yang akan dibahas oleh Fred Davis (1989) : Kegunaan/Kemanfaatan (*Perceived usefulness*), kemudahan penggunaan (*Perceived ease of use*), sikap (*attitude toward using technology*), intensi (*behavioral intention to use*), dan penggunaan teknologi sesungguhnya (*actual technology use*)(Indyah Hartami Santi, 2021).

Dan nantinya 5 faktor diatas dalam penelitian ini akan penulis gunakan sebagai alat untuk menganalisis e-voting pada 2 kalurahan yang akan diteliti dalam keberlangsungan e-voting pada pemilihan kepala desa.

b. Demokrasi Elektronik (*E-Democracy Theory*)

e-demokrasi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mempermudah interaksi pemerintah dan juga Masyarakat. e-demokrasi dengan huruf e-pada di awal kata demokrasi memiliki makna berarti (elektronik), yang menandakan adanya sentuhan teknologi informasi dan komunikasi di dalamnya. Belum ada konsepsi yang jelas mengenai demokrasi elektronik atau e-democracy ini. Dalam demokrasi elektronik inilah sebuah inovasi pada sistem politik yang perannya hanya pada batas menjadi sarana untuk berpolitik, sarana dengan teknologi komunikasi dan informasi digunakan ketika sarana lain untuk menyampaikan aspirasi tertutup. E-demokrasi hanya sebuah sarana, tetapi praktiknya, demokrasi elektronik kerap dipandang sebagai tujuan (Alwajih, 2014).

Pemilihan secara elektronik maupun konvensional masing masing mempunyai kekurangan serta kelebihan, tetapi dengan adanya percobaan penggunaan sistem pemilihan dengan menggunakan sistem pemilihan elektronik menunjukkan bahwa adanya pengaruh teknologi dalam bentuk sistem pemilihan umum di Indonesia, oleh karena itu masyarakat dan tentunya pemerintah harus bersiap akan perkembangan sistem pemilihan yang akan datang, terutama pemerintah yang harus mempertimbangkan tentang kebijakan terkait sistem pemilihan ini.

c. Kelebihan dan kelemahan E-voting

Dalam hal apapun semua kelebihan dan kekurangan pasti ada, seperti halnya e-voting (Hardjaloka & Simarmata, 2016).

a) Kelebihan E-Voting

- **Tidak memakan waktu banyak dalam perhitungan suara**
Pada sistem e-voting ketika perhitungan suara berlangsung sudah otomatis kerekap dari sistem yang tentu saja tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menghitung secara manual dan hasil perhitungannya akurat.
- **Mudah dalam Pelaksanaan Pemilihan**
Untuk mengatasi terjadinya golput khususnya oleh masyarakat rentan maka dengan teknologi e-voting menjanjikan untuk mengurangi angka golput dengan menggunakan teknologi yang dapat khusus dimengerti oleh kelompok rentan tersebut dan akan lebih muda terdata masyarakat yang sudah melakukan pemilihan dengan masyarakat yang belum melaksanakan pemilihan.
- **Mengurangi biaya**
Dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pada saat pemilihan. Seperti halnya pemilihan konvensional pasti membutuhkan kertas untuk melakukan pemilihan yang dimana kertas tersebut hanya dapat digunakan satu per seorangnya, Namun dengan e-voting hanya perlu menyediakan mesin

elektronik dengan menggunakan e-KTP pemilih, yang mana mesin ini dapat dipergunakan berulang-ulang.

b) Kekurangan E-Voting

- Rusaknya Kredibilitas dalam Pemilihan Umum

Tidak menutup kemungkinan akan terjadinya “hack” dari progremmer lain untuk mendapatkan data hasil e-voting ini, Berbagai upaya dapat mengurangi kerentanan sistem e-voting, termasuk keamanan komputer, keamanan fisik, pengujian dan analisis sistem dan coding, dan prosedur pemilihan yang baik. dapat menciptakan bahaya bahwa hasil pemilu yang tidak sah akan diterima, karena adanya manipulasi yang menunjukkan seolah-olah tidak terjadi kecurangan secara meyakinkan.

- Masalah Operasional dan Logistik Terkait Kendala Lingkungan

Pemilihan dengan sistem e-voting ini sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang baik agar nantinya e-voting bisa dilaksanakan secara serentak dan lancer. Tidak hanya itu e-voting juga memerlukan tenaga Listrik yang memadai dan juga tenaga ahli untuk membantu pengoprasian e-voting ini. Dilihat dari kondisi Indonesia khususnya pada daerah – daerah pedalaman yang masih kurang terjamah Listrik dan juga tenaga sumber daya manusia yang baik dan melek komputer akan sedikit rumit dalam pengoprasian e-voting ini.

G. Hipotesa

Sebagai panduan rumusan masalah dengan dugaan sementara bahwa terdapat perbedaan persepsi tentang e-voting tingkat desa di Kalurahan Kepuharjo dengan Kalurahan Sidoluhur Kabupaten Sleman. Perbandingannya akan di ukur sesuai dengan populasi dan sempel yang ada.

H. Definisi Konseptional

Definisi konseptional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian. Didalam penelitian ini mendefinisikan Perbandingan Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kalurahan Kepuharjo dan Kalurahan Sidoluhur Kabupaten Sleman Tahun.

1. Persepsi

Persepsi memiliki makna yang luas, Persepsi adalah sebuah proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indra manusia Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

2. E-voting

e-voting itu sendiri berkaitan dengan teknologi, dimana teknologi ini hadir untuk mempermudah langkah manusia dalam melaksanakan segala hal. Maknanya bahwa e-voting adalah sebuah cara baru untuk menggunakan hak memilih dengan menggunakan inovasi pada sistem pemilu antara perkembangan teknologi dan juga prinsip dasar demokrasi. Pembaharuan yang terjadi dalam hal ini dimana pemilihan sebelumnya menggunakan surat suara (kertas) dengan mencoblos ataupun mencontreng berubah menggunakan teknologi dan medianya adalah komputer, pemilih hanya dengan meng-klik gambar calon yang akan dipilih. Tujuan utama dari hadirnya inovasi e-voting ialah untuk mempermudah dan mempercepat proses rekapitulasi suara dan ketepatan hasil pemilu.

I. Definisi Oprasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya (Ida harifah,2018)

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Perbandingan Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kalurahan Kepuharjo dan Kalurahan Sidoluhur Kabupaten Sleman Tahun 2021 ”maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. 7 Definisi Oprasional

No	Definisi Oprasional	Variabel	Indikator
1.	Teori Penerimaan Teknologi oleh Fred Davis (1989)	Variabel Bebas (X1) E-Voting Kalurahan Kepuharjo	1. Kegunaan 2. Kemudahan Penggunaan 3. Sikap 4. Intensi 5. Penggunaan Teknologi Sesungguhnya
	Teori Penerimaan Teknologi oleh Fred Davis (1989)	Variabel Bebas (X2) E-Voting Kalurahan Kepuharjo	1. Kegunaan 2. Kemudahan Penggunaan 3. Sikap 4. Intensi 5. Penggunaan Teknologi Sesungguhnya

Sumber : Data Oleh Penulis (2023)

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dimana penelitian ini nantinya menggunakan data kuesioner atau angket untuk mengetahui data yang akurat sesuai dengan pengalaman responden dan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di dua kalurahan yang berada di kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta, tepatnya pada kalurahan Kepuharjo kecamatan Cangkringan dan kalurahan Sidoluhur kecamatan Godean.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang langsung disusun oleh penulis dari responden berupa keterangan yang terkait persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan e-voting pada dua kalurahan yang berbeda. Data-data yang akan diperoleh peneliti yaitu berasal dari masyarakat Desa Tertinggal dan Desa Berkembang yang berada di Kabupaten Sleman. dengan hasil yang didapatkan dari responden terkait yang dilakukan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam beberapa bentuk mulai dari observasi penulis melakukan pengamatan langsung sesuai dengan fenomena atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada kedua kalurahan terkait untuk mendapatkan jawaban sesuai pandangan dan pengalam responden ketika berlangsungnya peristiwa tersebut.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah sebuah data yang sudah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu guna sebagai acuan analisis dan penyempurna penelitian yang penulis lakukan. Data sekunder ini dapat kita ambil dari banyak lini seperti : data pemerintah, hasil survei, media sosial maupun data historis agar mempermudah penulis untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari permasalahan yang akan diteliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2000). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2013), Populasi adalah sebuah wilayah yang mempunyai karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi pada penelitian ini adalah Masyarakat Kalurahan Kepuharjo yang berusia 17 tahun keatas berjumlah 2.548 Jiwa (BPS Kabupaten Sleman, 2022) dan Kalurahan Sidoluhur 6.030 Jiwa (Statistik, 2022).

b. Sampel

Sampel adalah beberapa atau wakil dari populasi yang memiliki sifat dan juga karakteristik yang sama dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang akan diteliti diteliti.

Teknik Slovin adalah rumusan untuk menentukan jumlah sampel seperti berikut : $n = N/N (d)^2 + 1$

Keterangan :

n = Besarnya ukuran sampel

N = Populasi

d = Presisi yang diinginkan untuk diambil

Dalam penelitian ini jumlah sampel yang saya ambil adalah:

Kalurahan Kepuharjo :

$$n = \frac{N}{N (d)^2 + 1}$$

$$n = \frac{2.548}{2.548 (10\%)^2 + 1}$$

$$n = \frac{2.548}{2.548 (0,01)^2 + 1}$$

$$n = \frac{2.548}{26,48}$$

$$n = 96,22$$

Kalurahan Sidoluhur :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

$$n = \frac{6.030}{6.030 (10\%)^2 + 1}$$

$$n = \frac{6.030}{6.030 (0,01) + 1}$$

$$n = \frac{6.030}{61,30}$$

$$n = 98,40$$

Sampel yang akan diambil dalam penelitian di dua kalurahan ini berjumlah 100 sampel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara yang harus dilaksanakan guna mendapatkan hasil dan data yang maksimal. Pengumpulan data dengan proses pengumpulan data primer sesuai dengan tujuan yang peneliti rencanakan. Dalam pengumpulan data yang akan peneliti lakukan harus menggunakan tata cara agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu peneliti melakukan pengumpulan data sebagai berikut :

a. Kuesioner (Angket)

Penelitian ini menggunakan Kuesioner dimana ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis untuk responden agar nantinya dijawab sebagai mana yang terjadi. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien agar peneliti mengetahui pasti

variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2013).

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner agar mendapatkan data akurat dari masyarakat tentang bagaimana perbandingan persepsi masyarakat terhadap pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem e-voting. Adanya kuesioner bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah pertanyaan tertulis kemudian akan dijawab secara tertulis oleh responden. Kuesioner yang digunakan yaitu berbentuk skala lima tingkat (Likert).

Dengan rumus yang akan digunakan :

$$P = f/n * 100\%$$

Dimana :

P = Presentase

f = Frekuensi atau banyaknya jawaban

n = Jumlah responden

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu statistik deskriptif. Teknik analisis data yang berpangkal pada peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif atau yang dapat dinyatakan dengan angka (skala, indeks, rumus dan sebagainya). Sedangkan untuk menyimpulkan data yang diperoleh dari kuesioner menggunakan skala indeks dengan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{1.F1 + 2.F2 + 3.F3 + 4.F4 + 5.F5}{N}$$

Keterangan :

- I : Indeks
- F : Frekuensi sampel/sub sampel
- N : Jumlah sampel
- 1 : Kategori sangat tidak baik
- 2 : Kategori tidak baik
- 3 : Kategori kurang baik
- 4 : Kategori baik
- 5 : Kategori sangat baik
- F1 : Sangat tidak baik
- F2 : Tidak baik
- F3 : Kurang baik
- F4 : Baik
- F5 : Sangat baik

Untuk perhitungan interval dari nilai-nilai indeks adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Interval} & : \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Banyaknya kriteria}} \\
 & = \frac{5-1}{5} \\
 & = 0,80
 \end{aligned}$$

Keterangan :

4,21 – 5,00 : Sangat baik

3,41 – 4,20 : Baik

2,61 – 3,40 : Cukup baik

1,81 – 2,60 : Kurang Baik

1,00 – 1,80 : Buruk